

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara dengan demografi, kepulauan, provinsi, dan penduduk yang beragam. Dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat, Indonesia menempati sekitar 3,5% dari total populasi dunia (*World Population Review, 2025*). Jumlah penduduk yang besar ini membawa konsekuensi positif berupa potensi pasar dan tenaga kerja yang melimpah, namun juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam konteks negara kepulauan dengan banyak provinsi. Indonesia juga memiliki berbagai potensi sumber daya yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas makroekonomi pun menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Edison, 2023). Meski demikian, perbedaan lokasi dan keterbatasan pemerataan pembangunan antar wilayah kerap menimbulkan ketimpangan, sehingga masih adanya berbagai permasalahan makro ekonomi pada setiap wilayah di Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yaitu pengangguran yang sudah menjadi masalah yang kompleks secara makroekonomi di setiap negara termasuk pada di Indonesia. Pengangguran merujuk pada keadaan ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan, tetapi secara aktif berusaha mencari kesempatan kerja. Kondisi ini muncul apabila jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seluruhnya dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. (Sukirno, 2005). Isu ini sering kali menjadi hambatan utama dalam meningkatkan taraf pertumbuhan perekonomian (Muslim, 2014). Pengangguran akan menjadi masalah jika terjadi ketidakselarasan antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan di suatu negara yang lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja. Beberapa permasalahan pengangguran di Indonesia diikuti dengan pengaruh harga-harga yang kian naik seperti inflasi, kurangnya penanaman stok modal dan kondisi perekonomian yang tidak pasti (Rokhim, 2023).

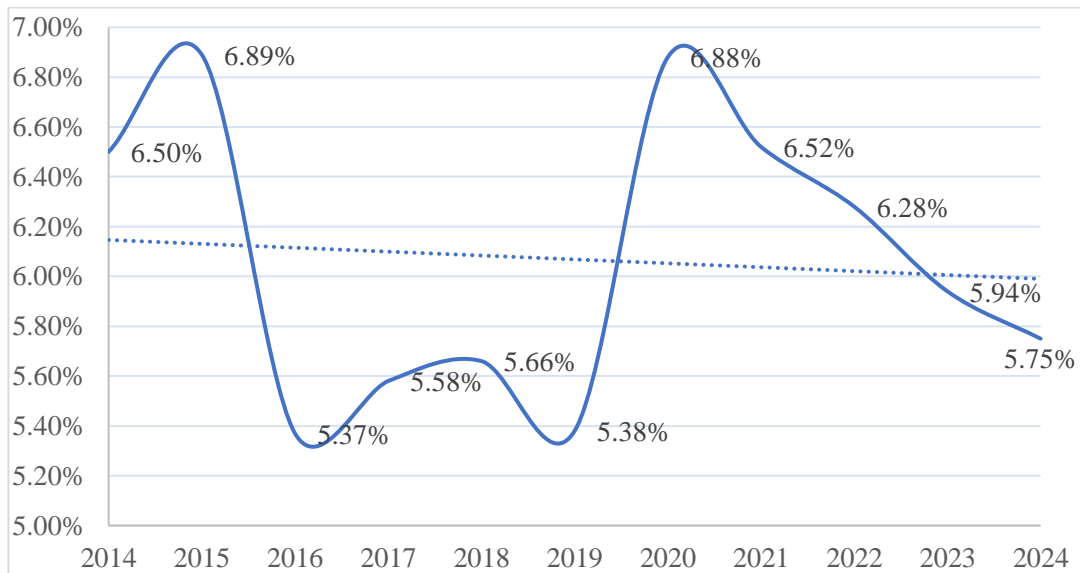
Pengangguran terbuka di Sumatera Barat sudah menjadi dilema kompleks bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut mengacu pada individu yang tergolong dalam angkatan kerja dan sedang berupaya memperoleh pekerjaan, atau belum memperoleh pekerjaan meskipun telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tertentu (Mankiw, 2011). Pengangguran terbuka juga merupakan indikator yang paling lazim digunakan dalam kajian makroekonomi dan kebijakan publik karena merepresentasikan bagian dari sasaran pembangunan nasional dan daerah. Fenomena ini juga sering kali dialami oleh kelompok usia produktif angkatan kerja yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja sesuai kualifikasi angkatan kerja.

**Tabel 1.1 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2024 (Persen)**

Provinsi	Rata-rata
Aceh	6,10
Sumatera Utara	5,98
<b>Sumatera Barat</b>	<b>6,06</b>
Riau	4,97
Jambi	4,52
Sumatera Selatan	4,56
Bengkulu	3,49
Lampung	4,37
Kep. Bangka Belitung	4,49
Kep. Riau	8,17

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 dijelaskan Provinsi Sumatera Barat memasuki 10 besar dengan peringkat ke-9 sebagai tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat menjadi peringkat terbesar ke-2 dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Sumatera. Rata-rata penduduk di Sumatera Barat sekitar 6.06% pada tahun 2018-2024 yang termasuk dalam pengangguran terbuka (BPS, 2024). Hal tersebut pada akhirnya turut memengaruhi tingkat pertumbuhan secara makroekonomi, yang dapat menjadi indikator signifikan dalam menilai kondisi perekonomian daerah.



**Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2024 (Persen)**  
Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 menjelaskan kondisi pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2014–2019 menunjukkan pola yang fluktuatif dan mengalami penurunan menjelang akhir periode tersebut. Meskipun tingkat pengangguran di Sumatera Barat telah menurun selama lima tahun terakhir 2019-2024, tentunya penyerapan tenaga kerja belum mencapai kesempatan kerja penuh dan akan berimplikasi terhadap penurunan produktivitas daerah terutama di sektor riil atau sektor industri karena rendahnya penyerapan tenaga kerja dan rendahnya sumber daya manusia dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga akan berakibat pada penurunan *output* perekonomian dan produktivitas.

Salah satu penyebab kondisi ini karena kualifikasi dari lapangan kerja yang tersedia dan keterampilan yang menjadi permasalahan akan berdampak pada kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang tersedia. Bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah, penawaran tenaga kerja akan meningkat. Namun, jika pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, maka tingkat pengangguran terbuka juga cenderung meningkat (Sari et al., 2016). Keterkaitan antara variabel ini menjadi isu permasalahan makroekonomi yang sering dibahas dalam praktik ekonomi. Hal tersebut berimplikasi penurunan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

secara langsung dan akan berdampak pada jumlah pengangguran terbuka yang kian meningkat. Selain faktor-faktor diatas, variabel makroekonomi seperti inflasi juga turut menjadi isu yang sering dibahas dalam perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran terbuka (Mankiw, 2011).

Inflasi juga menjadi permasalahan seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Inflasi diartikan sebagai situasi meningkatnya harga barang maupun jasa secara umum yang terjadi secara berkesinambungan dalam periode tertentu. inflasi tidak merujuk pada kenaikan harga satu atau dua jenis barang saja, melainkan mencerminkan kenaikan harga secara menyeluruh yang terjadi pada sebagian besar komoditas dalam perekonomian secara menyeluruh dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Mankiw, 2011). jika inflasi tidak bisa terkendali dengan baik. Inflasi dapat berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat keseriusan suatu permasalahan ekonomi yang sedang dialami suatu daerah (Dharmayanti, 2011).

Kondisi perekonomian yang ditandai oleh kondisi inflasi yang meningkat tajam pada suatu wilayah dapat memengaruhi permintaan terhadap output serta kesempatan kerja, yang pada akhirnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap besarnya tingkat pengangguran terbuka. Dalam fenomena di beberapa wilayah, jika inflasi meningkat terus menerus maka juga akan berdampak pada beberapa sektor pertumbuhan ekonomi yang kian menurun karena akan banyaknya masyarakat yang menganggur. hal ini juga berpotensi terhadap menurunnya taraf hidup dan daya beli penduduk karena biaya hidup yang meningkat (Meiditambua et al., 2023). Secara keseluruhan, masyarakat akan cenderung untuk enggan mengonsumsi barang dan jasa yang akan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat, tingkat laju inflasi menunjukkan penurunan yang landai pada periode 2014-2024 (BPS, 2024). Hal ini secara teori ekonomi jangka pendek mengindikasikan bahwa penurunan inflasi diikuti kenaikan pengangguran (Rosadi., 2011). Namun beberapa temuan mengindikasikan bahwasanya korelasi inflasi tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka karena berbagai alasan dan kebijakan di suatu daerah



(Veronika dan Mafruhah, 2022). Hal ini menjadi permasalahan karena pada studi kasus Provinsi Sumatera Barat, walaupun tingkat inflasi di Sumatera Barat menurun namun masih angka pengangguran terbuka beberapa tahun terakhir masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, akan menjadi pembahasan pada hubungan dan keterkaitan inflasi terhadap pengangguran terbuka.

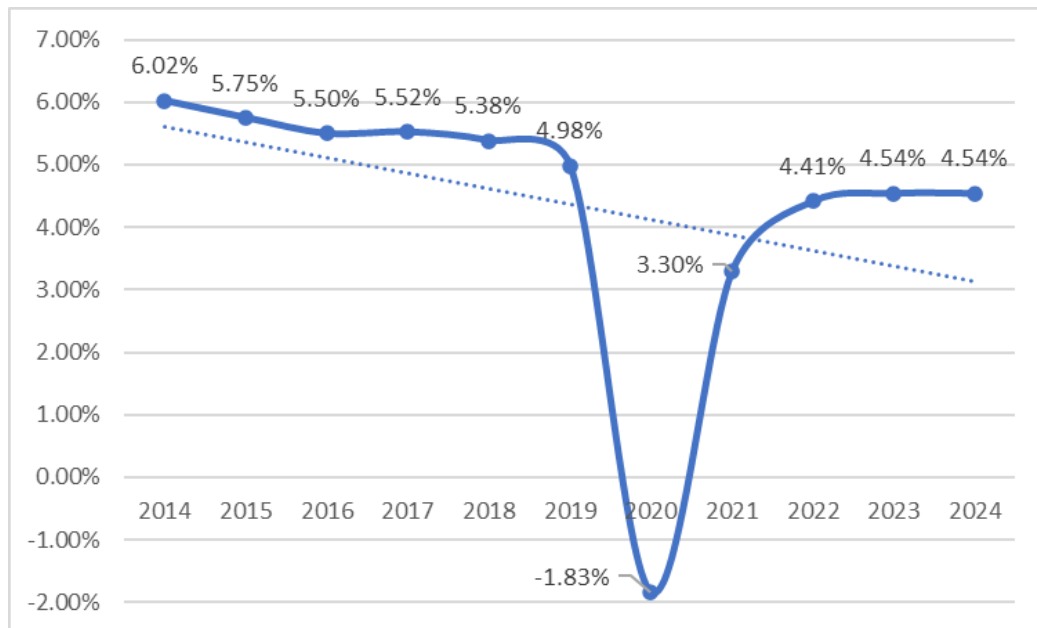
Salah satu penyebab utama terjadinya masalah pengangguran adalah rendahnya tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Investasi ialah sebagai kegiatan menempatkan sejumlah modal atau dana dengan harapan memperoleh imbal hasil pada periode yang akan datang. (Umam, 2019). Dalam sistem pasar ekonomi, para pelaku ekonomi melakukan produksi barang dan jasa umumnya berorientasi pada perolehan keuntungan. Keuntungan tersebut baru dapat dicapai apabila produksi yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar, yaitu pada saat terjadi kenaikan kebutuhan konsumen terhadap produk barang maupun jasa yang ditawarkan. Meningkatnya permintaan akan mendorong semakin besarnya insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya, hal tersebut akhirnya berpotensi mendorong permintaan tenaga kerja yang akan terciptanya lapangan kerja. Untuk mendorong penurunan angka pengangguran terbuka, investasi baru sangat diperlukan sebagai pembentuk stok modal. Investasi ini bisa datang dari pemerintah maupun pihak swasta.

Selain itu, belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk dalam investasi ini. Peningkatan investasi semacam ini diharapkan dapat memacu kenaikan produksi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kebutuhan akan tenaga kerja. (Sukirno, 2005). Jika investasi yang diberikan tidak terserap dengan efektif dan permintaan agregat yang lemah, maka perusahaan cenderung akan membatasi tenaga kerja yang berakibatkan pengangguran yang semakin besar dan perusahaan cenderung akan mempertahankan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan terlatih. Rasio modal terhadap tenaga kerja yang tinggi dalam investasi menunjukkan bahwa mayoritas investasi yang masuk cenderung berorientasi pada penggunaan modal yang besar dan tidak berfokus pada penyerapan tenaga kerja/padat karya, sehingga tidak secara proporsional

menciptakan lapangan kerja yang luas. Peningkatan permintaan agregat akan mendorong peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Hal ini selanjutnya Peningkatan aktivitas produksi akan diiringi oleh bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga berimplikasi pada berkurangnya jumlah pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara berdampak signifikan terhadap dinamika tingkat pengangguran terbuka. Dalam perspektif teori makroekonomi, Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno., 2005). hubungan antara pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor fundamental yang menentukan stabilitas perekonomian. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan keadaan perekonomian suatu negara dapat mencerminkan apakah tingkat pengangguran terbuka meningkat atau justru berada dalam fase penurunan (Anggoro, 2015). Permasalahan terkait pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi termasuk ke dalam isu makroekonomi yang bersifat jangka panjang/ *long term*.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan memberikan lapangan kerja lebih banyak yang akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja dapat memicu berbagai permasalahan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan angka pengangguran terbuka. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan menciptakan kesempatan kerja, diperlukan peningkatan output agregat secara berkelanjutan. Secara makroekonomi, Kondisi pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh kenaikan Pertumbuhan Ekonomi riil sebagai indikator utama yang mencerminkan adanya peningkatan dalam pendapatan nasional (Tambunan, 2011).



**Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2024 (Persen)**

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sepanjang periode 2014–2024 mengalami pola fluktuatif yang cenderung menurun lamban. Secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari kondisi domestik maupun perkembangan ekonomi global. Berdasarkan Gambar 1.2 berikut, Sumatera Barat mencatat pertumbuhan ekonomi negatif pada periode pada tahun 2017–2019, yang menandakan juga pada penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Namun pada akhir-akhir periode 2021–2024, walaupun terjadi pemulihan ekonomi pasca fenomena pandemi, tetapi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di awal tahun 2024 mengindikasikan bahwa pertumbuhan tersebut mungkin belum sepenuhnya terserap karena ada efek *lag* atau tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dengan pekerjaan yang stabil dan berkualitas. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif seharusnya berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran, sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Okun (Mankiw, 2011).

Selain itu, variabel makroekonomi seperti inflasi dan investasi juga memegang peranan penting, karena keduanya berpengaruh langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Beberapa jenis pengangguran meliputi pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran terdidik, pengangguran terselubung dan lainnya. Penelitian ini memilih pengangguran terbuka yang terbukti dan juga merepresentasikan bagian dari usia produktif angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan/tidak bekerja pada beberapa daerah, sehingga lebih cocok dan berdampak langsung pada variabel makroekonomi jika dibandingkan dengan jenis pengangguran lainnya. Beberapa penelitian empiris di Indonesia, seperti Veronika dan Mafruhah, (2022) dan Helvira dan Rizky, (2020) Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Hal ini tercermin pada situasi tahun 2023, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan inflasi yang terkendali, diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka. Namun pada beberapa penelitian empiris yang lainnya juga menunjukkan variabel inflasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di beberapa daerah menunjukkan korelasi yang signifikan dengan berbagai indikator makroekonomi (Hartati, 2020). Hal ini akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini,

Dalam konteks makroekonomi, pengangguran juga mencerminkan ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya manusia, yang pada gilirannya melemahkan daya beli, menurunkan kepercayaan investor, serta menghambat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Razia et al., 2023). Pada studi kinerja ekonomi Sumatera Barat sangat memengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Saat pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat, investasi meningkat, dan sektor-sektor produktif berkembang, Dengan demikian, angka tenaga kerja pun akan mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak sejalan dengan bertambahnya kesempatan kerja dapat menyebabkan tekanan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran (Prasaja, 2013). Maka daripada itu, studi ini tidak hanya penting secara teoritis, namun akan sangat strategis dan efektif untuk melihat bagaimana masalah-masalah perekonomian di Sumatera Barat. Permasalahan pengangguran jika dibiarkan akan



semakin terpuruk dan mengganggu stabilitas perekonomian di daerah Sumatera Barat. Terjadinya permasalahan perekonomian di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang di atas, peneliti berupaya melakukan kajian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Variabel Makroekonomi terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat”**. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor makroekonomi yaitu inflasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengangguran terbuka terkhusus Provinsi Sumatera Barat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk merumuskan jawaban atas beberapa permasalahan pokok sebagai berikut.:

1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana peran investasi berkontribusi dalam memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dan kegunaan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris (*evidence-based policy*) bagi pemerintah pusat dan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka.
2. Hasil penelitian dapat mengindikasikan perlunya sinergi antara pemerintah dalam kebijakan moneter (pengendalian inflasi), kebijakan fiskal (stimulus investasi dan pertumbuhan), dan kebijakan ketenagakerjaan (ketersediaan lapangan kerja, pelatihan dan *jobmatching*) untuk mencapai target penurunan pengangguran terbuka.
3. Hasil dan metodologi penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti lain dari semua khalayak yang ingin mengembangkan studi lebih lanjut tentang pengangguran terbuka.

